

# **BAB I**

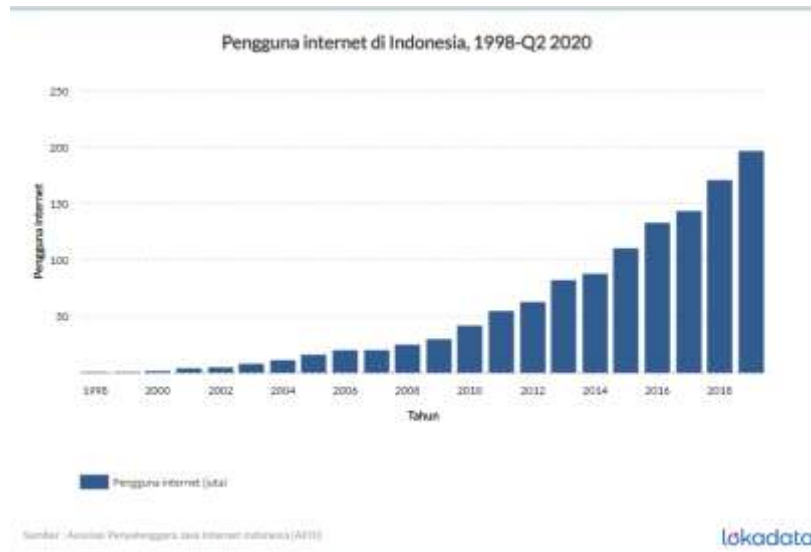
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang sangat cepat sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Bukan hanya dalam aspek budaya yang dahulu serba tradisional kini menjadi modern. Namun, perkembangan zaman juga mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia. Salah satu akibat dari perkembangan zaman yang sangat bisa dirasakan dampaknya adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mampu merubah tatanan hidup manusia.

Teknologi dimanfaatkan oleh manusia sebagai penunjang kebutuhan karena mampu menciptakan kemudahan dalam berbagai sektor kehidupan, dengan adanya teknologi sistem kerja yang dulunya manual dengan banyak memanfaatkan tenaga manusia kini bergeser menjadi instan dengan kecanggihan yang ada. Salah satunya adalah teknologi digital, teknologi digital merupakan alat dengan sistem komputerisasi sehingga sistem pengoperasiannya otomatis tanpa menggunakan tenaga manusia. Pondasi dari teknologi digital sendiri adalah komputer, *smartphone*, dan internet.

Secara umum internet merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan diseluruh dunia. Internet menyediakan segala macam informasi layaknya perpustakaan besar. Internet sendiri muncul di Indonesia sekitar tahun 1990-an dan hingga kini internet terus mengalami perkembangan serta pertumbuhan pengguna.



**Gambar 1.1 Pengguna internet di Indonesia, 1998-Q2 2020**

**(Sumber: lokadata)**

Dikutip dari loka data, berdasarkan survey yang telah dilaksanakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga kuartal II tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2019 yaitu 196,7 juta pengguna. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 8,9 persen atau sebanyak 25,54 juta pengguna (Lokadata.com).

Adanya kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga akan berdampak pada peningkatan jumlah pengguna internet di tiap provinsi dan daerah yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut data mengenai jumlah pertumbuhan penerimaan sinyal internet telepon seluler di Provinsi Jawa Tengah.

**Table 1.1 Jumlah pertumbuhan penerimaan sinyal internet telepon di Provinsi Jawa Tengah**

| Tahun | Angka jumlah pertumbuhan penerimaan sinyal internet telepon seluler di Provinsi Jawa Tengah |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018  | 6.659                                                                                       |
| 2019  | 7.294                                                                                       |

**Sumber : Jawa Tengah dalam angka**

Berdasarkan data diatas, jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, begitupun dengan jumlah pertumbuhan penerimaan sinyal internet telepon seluler di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019.

**Tabel 1.2 Jumlah peningkatan kantor desa dengan internet dan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Rembang**

| Tahun | Angka jumlah pertumbuhan kantor desa dengan internet di Kabupaten Rembang | Angka jumlah pertumbuhan menara telekomunikasi |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2016  | 175                                                                       | 149                                            |
| 2017  | 294                                                                       | 160                                            |
| 2018  | 294                                                                       | 174                                            |
| 2019  | 294                                                                       | 174                                            |

**Sumber : Badan Pusat Statistik 2017**

Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kantor desa dengan internet dan jumlah pertumbuhan menara telekomunikasi di wilayah Rembang tidak mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019, sehingga dapat menimbulkan peluang masalah tersendiri.

Seiring dengan berkembangnya dan meningkatnya jumlah pengguna internet memungkinkan masyarakat bebas dalam memperoleh informasi, termasuk

informasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Masyarakat secara bebas dapat melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah, contohnya laporan keuangan, kinerja pemerintah, kebijakan pemerintah, rencana kerja proyek dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga peraturan mengenai kebebasan dalam mengakses informasi yaitu UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Nomor 14 tahun 2018 sebagai salah satu bentuk dari pemerintah untuk memberikan kebebasan dalam memperoleh informasi.

Adapun teknologi untuk menunjang UU KIP tahun 2018 salah satunya adalah *Electronic Government (E-government)* yang bertujuan untuk memberikan sistem pelayanan kepada masyarakat lebih praktis dengan memanfaatkan internet, sehingga informasi dapat tersebar dengan mudah kepada masyarakat. Pada era keterbukaan informasi seperti saat ini, *e-government* diharapkan mampu menjadi tonggak dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan cara memberikan transparansi hak-hak publik, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terciptanya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap daerah. Adapun konsepnya terdiri dari adanya akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, kepastian hukum serta responsif. *E-Government* menjadi penting dikarenakan kebutuhan akan adanya transparansi dalam sistem pemerintahan dan juga akibat dari tuntutan perkembangan zaman.

Pedoman untuk memanfaatkan serta menggugurkan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem administrasi pemerintahan juga telah diatur dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2001 sebagai tumpuan dalam mengembangkan *e-government*. Selain itu, terdapat pula Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mengenai pengembangan sebuah susunan kerja untuk *e-government*. Kemudian terdapat pula Keppres Nomor 6 Tahun 2001 mengenai penugasan kepada Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) untuk melakukan pengembangan terhadap *National Information Technology Framework (NITF)* dengan tujuan menciptakan masyarakat telematika berdasar atas pengetahuan pada tahun 2020 (Ratmanto, 2006). Selain peraturan dari pemerintah pusat, di Kabupaten Rembang sendiri juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang penggunaan tata kelola pemerintah berbasis elektronik.

Salah satu media yang digunakan untuk menerapkan elektronik *government* adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah teknologi yang berbasis jaringan internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat konten yang dapat membangun identitas, relasi, percakapan, reputasi dan grup. Media sosial juga salah satu media untuk berkomunikasi secara virtual yang diminati masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh adanya survey yang berjudul “Digital2021” yang dilakukan pada Februari 2021 oleh layanan manajemen konten yaitu HootSuite serta *We Are Social* yang merupakan agensi pemasaran media sosial, yaitu dari penduduk Indonesia yang kurang lebih total populasinya 274,9 juta jiwa, terdapat 170 juta jiwa yang merupakan pengguna aktif dan pengakses internet termasuk media sosial. Dari data tersebut juga membuktikan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-9 dari jumlah total negara yang dianalisis yaitu 47 negara (Pasha, 2021).

Penerapan *e-government* tentu tidak lepas dari bidang humas dari suatu lembaga, karena humas berperan penting dalam gerbang layanan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Suatu organisasi atau instansi pemerintahan dituntut mampu untuk menghadapi era digital dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi serta kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Peran sumber daya manusia perlu diarahkan untuk kemajuan suatu organisasi atau instansi dimasa yang akan datang. Sumber daya manusia yang memiliki pola pikir kreatif akan cenderung membangun pola kerja dengan ketrampilan interpersonal yang kuat, hal ini secara tidak langsung bersifat memakasa untuk produktif dalam segala bidang. Fungsi kehumasan dalam suatu instansi tidak hanya berperan dalam melakukan tugas kehumasan saja, namun juga sebagai *Early Warning Sistem*.

Adanya peraturan penerapan sistem pengelolaan informasi dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan teknologi digital, organisasi dalam pemerintah seolah-olah diharuskan untuk terus melakukan unsur dalam perbaikan dan penyempurnaan untuk menghadapi publik agar mampu menghadapi segala tantangan yang ada seperti semakin terbukanya informasi dan komunikasi dengan dunia luar, tidak adanya pembatas dan filter serta segala sesuatu menjadi kesatuan dan sangat riskan terhadap ketahanan serta keamanan dalam suatu organisasi.

Pada era digital, humas secara tidak langsung diharuskan untuk lebih cepat dalam menghasilkan solusi guna memenuhi kebutuhannya, salah satu upayanya adalah terus menggali informasi dan berinovasi untuk menunjang keberlangsungan suatu instansi, karena humas berperan penting yaitu sebagai sarana interaksi antara lembaga dengan publiknya. Melalui bidang humas segala informasi dapat tersalurkan kepada masyarakat, humas juga perlu meningkatkan relasi ke berbagai lembaga, organisasi, dan lini lainnya sehingga sumber informasi dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kendala. Bidang humas dalam pemerintahan juga diharuskan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak internal atau eksternal sehingga terbukanya ruang komunikasi dalam menangkal *hoax* dan diskomunikasi.

Humas pemerintahan harus selalu berkembang mengikuti teknologi dan siap dalam menghadapi tantangan serta peluang pada era keterbukaan informasi seperti saat ini. Karena *the role of PR* adalah mengetahui performance dan reputasi dalam organisasi itu sendiri. Tantangan humas di era perkembangan teknologi diantaranya adalah harus mempunyai *global thinking*, *high technology*, kemampuan riset dan profesional serta unsur dalam stakeholder. Humas juga dituntut untuk membuat unsur yang dapat menciptakan reputasi yang unik dan kreatif.

Bidang humas merupakan salah satu bidang yang merasakan dampak dari pengaruh perkembangan teknologi, maka dari itu mau tidak mau harus bertransformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Namun, dengan adanya perkembangan zaman juga telah menghasilkan produk yang berkontribusi membantu unsur konvensional yang sudah ada. Pada saat ini kita tengah berada pada era digital, dalam unsur kehumasan digital aspek yang dilibatkan menitikberatkan pada *platform online* dan *media social* untuk mencapai ruang virtual sehingga memunculkan profesi baru yang secara khusus bekerja dalam bidang tersebut.

Humas pemerintah berperan penting sebagai gerbang layanan informasi antara instansi dan publik sasaran. Informasi yang disampaikan juga harus akurat, cepat dan jelas, agar pesan yang disampaikan bersifat informatif dan dianggap penting oleh masyarakat. Humas pemerintah juga harus memperoleh opini positif

dari masyarakat dan mampu mempertahankan kepercayaan terhadap pemerintah dengan mengelola informasi sesuai kebutuhan publik dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarannya.

Berdasarkan aturan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Nomor 56 Tahun 2016 struktural pemerintah daerah pada tahun 2020 mengalami perubahan besar. Salah satunya adalah Humas yang diubah menjadi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokopimda), meskipun mengalami perubahan, pemegang fungsi penyediaan layanan keprotokolan dan kehumasan tetap sama. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menjalankan aktivitas manajemen media untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau publik. Humas pada Bagian Prokopimda Sekretariat Daerah Rembang di dalam menjalankan peran dan fungsi komunikasi mewakili kelompok organisasi mengacu pada sebuah instansi yang disebut dengan hubungan masyarakat atau kehumasan. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretariat Daerah Rembang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi serta memelihara dan menciptakan iklim kondusif.

Kehumaan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang melalui Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan pendekatan komunikasi dengan masyarakat serta sebagai implementasi dari kebijakan *e-government*. Adapaun barometer yang harus dimiliki Humas di era digital antara lain bersikap etis, memahami target audiens untuk menentukan komunikasi yang tepat, memahami implikasi yang akan ditimbulkan dari kegiatan komunikasi dan mampu mengelola umpan balik (*feedback*) dari masyarakat (Kartika, 2019). Maka dari itu, dengan adanya peran kehumasan digital yang lahir dari adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta adanya kebijakan untuk memanfaatkan elektronik *government* penulis berupaya menganalisis unsur-unsur komunikasi yang mulai populer digunakan saat ini pada Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang sebagai objek kajian. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan pembahasan kajian pada hasil transformasi industri kehumasan yang muncul pada humas di Bagian Prokopimda Sekretariat Daerah Rembang yang juga didasarkan

atas kebijakan publik mengenai informasi digital. Maka dari itu, judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Unsur Komunikasi Dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Digital Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis unsur komunikasi dalam pengelolaan informasi digital kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan informasi digital kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis unsur komunikasi dalam pengelolaan informasi digital kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan informasi digital kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi faktual mengenai unsur-unsur komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi digital, serta dapat memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan informasi digital Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.

- a. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang unsur-unsur komunikasi yang digunakan oleh praktisi Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dan implementasi kebijakan pengelolaan informasi digital.

- b. Manfaat bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada mahasiswa terutama mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Humas mengenai

unsur-unsur komunikasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi digital oleh praktisi Kehumas Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang dan implementasi kebijakan pengelolaan informasi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pengalaman penelitian terdahulu kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.

c. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman kepada penulis dalam menganalisis dengan mempertimbangkan kesesuaian teori dengan praktek dilapangan kehumasan pemerintahan.

2. Secara praktis

a. Manfaat bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengetahuan akan pentingnya unsur-unsur komunikasi dan kebijakan pengelolaan informasi digital untuk mewujudkan *good governance* di era keterbukaan informasi.

b. Manfaat bagi pembaca atau masyarakat luas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas terutama masyarakat Rembang tentang unsur-unsur komunikasi yang digunakan dan implementasi kebijakan pengelolaan informasi digital yang diterapkan yang diterapkan oleh Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang melalui Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Daerah. .